

KEMISKINAN DI SRIHARJO DEWASA INI

Puthut Indroyono

Yayasan Agro Ekonomika

Eddy Junarsin

Mahasiswa FE-Universitas Gadjah Mada

ABSTRACT

Economic improvements should be appraised from growth, ethical, and sustainable development point of views. Hence, economic growth is only one of the improvement criteria. Subsequently, institutional economics hypothesizes that the roles of institutions and cultures are obvious in designing economic system and policies in a particular country. In other words, not one economic system is appropriate for every country. Accordingly, in order to find out that people economy is the most suitable economic system in Indonesia, we visited the village of Sriharjo on November 28, 2001. The results show that albeit its use of traditional economic system (agriculture) and financial institution, Sriharjo survived when the monetary crisis hit the village economy. This empirical result supports the hypothesis of institutional economics that cultures can help establish a strong foundation in an economy. The conclusion is in line with previous research finding by Mubyarto, Masri Singarimbun, and David Penny.

Keywords: *Institutional economics, people economy.*

PENDAHULUAN

Amat menarik memperhatikan dari waktu ke waktu bagaimana masyarakat pedesaan “menyiasati” berbagai peristiwa yang mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi mereka, baik yang datangnya dari luar maupun yang berkembangnya dari dalam masyarakat desa itu sendiri. Di bawah ini diuraikan hasil pengamatan lapang di desa “terkenal” Sriharjo, sebuah desa yang terletak 20 kilometer arah selatan kota Yogyakarta. Berbagai dampak positif proses industrialisasi/modernisasi yang berlangsung terutama sejak era tahun 1970-an telah membawa masyarakat desa Sriharjo kepada perbaikan taraf kehidupan sosial-ekonomi, meskipun ada juga pengaruh negatifnya.

Adalah Masri Singarimbun dan D.H. Penny, yang pada tahun 1969-1970 melakukan penelitian serius di desa Sriharjo,¹ khususnya di dusun Miri. Pada awal studinya, dua peneliti tersebut menyebut desa Sriharjo sebagai desa miskin dan terisolasi karena sangat terbatasnya fasilitas transpor yang menghubungkan desa tersebut dengan dunia luar. Dua pertiga penduduk Miri tergolong miskin dan sepertiganya tergolong “cukupan”. Diceritakan bahwa kemiskinan yang terjadi di desa itu sudah demikian parahnya sehingga Masri melukiskan dalam catatannya seorang pembuat

¹ Hasil penelitian tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan diterbitkan menjadi buku berjudul **Penduduk & Kemiskinan: Kasus Sriharjo di Pedesaan Jawa**, pada tahun 1976.

gerabah yang “kehilangan segala-galanya”, setelah terpeleset di sungai yang diseberangi.

Seorang perempuan pedagang keliling tergelincir ketika menyeberang sebuah kali (sungai) kecil dan seluruh isi tempayan yang dijunjungnya hancur berantakan. Ia menangis dan berkata “Usahaku hancur dan berantakan”. Harga semua bawanya itu hanya Rp 160,- (\$ 0,40).²

Menurut hasil pengamatannya sedikitnya ada dua hal pokok yang ditemukan sebagai “penyebab” kemiskinan di desa Sriharjo, yakni: **pertama**, kurangnya lahan untuk pertanian. Masalah tanah, sebagaimana yang banyak dirasakan di desa-desa lain di pulau Jawa, terlihat pada sempitnya rata-rata kepemilikan tanah, khususnya sawah untuk menanam padi. Tiadanya kesempatan untuk meningkatkan kehidupan melalui pertanian tanaman pangan akibat kecilnya faktor produksi tanah, telah menurunkan tingkat kesejahteraan mereka. **Kedua**, pertumbuhan penduduk. Tingginya pertumbuhan penduduk menciutkan kesempatan kerja penduduk desa dengan cepat, baik sebagai upahan (buruh tani) maupun untuk dirinya sendiri.

Sekitar lima tahun setelah penelitian pertama dilakukan, Masri Singarimbun melihat kembali perkembangan yang terjadi di desa Sriharjo. Kondisi kemiskinan di desa itu dilaporkannya tidak banyak berubah, bahkan menjadi semakin buruk.

“... keadaan golongan bawah di Sriharjo belum mengalami perbaikan. Mereka yang masih miskin sebagian tambah miskin. Perkembangan ekonomi Sriharjo pada tahun-tahun belakangan ini tidak mengakibatkan jurang antara yang kaya dan miskin mengecil. Sebaliknya, suatu proses sudah berkembang dimana jurang tersebut semakin lebar”³

Review sekaligus “kritik” Alan M. Strout dalam *Bulletin of Indonesian Economic Studies* (BIES) Juli 1974 terhadap analisis Masri Singarimbun dan Penny, menegaskan betapa tidak sederhananya masalah kemiskinan di perdesaan, khususnya di desa Sriharjo, dan umumnya di perdesaan Jawa/Indonesia. Sebab-sebab kemiskinan tidak hanya beraspek ekonomi saja, tetapi menyangkut aspek-aspek lain yaitu sosial dan budaya dari masyarakat. Masri menegaskan bahwa tekanan ekonomi akibat peningkatan jumlah penduduk telah sangat menciutkan usaha tani, yang pada gilirannya menyempitkan kesempatan kerja, dan menurunkan pendapatan. Namun menurut Strout, masalah penduduk bukanlah yang paling utama karena pertumbuhan penduduk Jawa tahun 1964 – 1970 adalah rata-rata di atas 2 persen per tahun, sedangkan di Sriharjo hanya satu persen, dan di dusun Miri 0,6 persen. Selain angka kelahiran dan kematian penduduk, lebih lanjut Strout menekankan bahwa faktor utamanya terletak pada *out-migration*, sebagai respon alamiah penduduk desa Sriharjo terhadap tekanan penduduk dan kemiskinan sebagaimana disebutkan Singarimbun.⁴ Data terakhir menunjukkan bahwa antara tahun 1988 sampai dengan tahun 2001, angka pertumbuhan penduduk Sriharjo tetap lebih kecil, yaitu sebesar rata-rata 0,7%/tahun.

Disamping itu, penduduk desa tidak hanya dapat meningkatkan hasil (*yield*) padi mereka, namun yang lebih penting, dapat menemukan sumber-sumber pendapatan lain. Strout menambahkan bahwa kekuatan-kekuatan sosial seperti ikatan “pemimpin-pengikut” atau “bapak-anak” dalam “pembagian rejeki” telah memperkuat ketahanan penduduk miskin untuk terus berusaha memperoleh tambahan pendapatan bagi keluarganya dalam situasi yang terjepit.

² Ibid., hal. 85

³ Ibid., hal. 187.

⁴ Alan M. Strout, Population and Poverty in Rural Java, Review article, *BIES*, Vol X, No.2, Juli 1974, hal. 130.

Dua penelitian lain yang dilakukan dua dan tiga dasawarsa kemudian, tepatnya masing-masing pada tahun 1989 oleh Singarimbun sendiri, dan tahun 1998 oleh P. Made Kertanegara, memberikan gambaran tidak saja sangat menarik, tetapi juga penemuan-penemuan yang bertentangan satu dengan yang lain. Terutama pada penelitian yang kedua, ketika terjadi krisis ekonomi 1997/1998, seolah-olah krismon telah menghancurkan semua hasil-hasil kemajuan yang telah dicapai pada masa-masa sebelumnya.

Pada tahun 1989 Masri Singarimbun kembali mengadakan kunjungan ke Sriharjo. Berbeda dengan kesan pertamanya pada tahun 1970 dan kesan kedua 1975, ia tidak lagi merasakan kesan miskin dan kumuh. Penduduk desa dengan mudah menemukan angkutan bus atau minibus yang lalu lalang setiap saat menuju ke kota maupun sebaliknya. Survei rumah tangga menunjukkan telah terjadinya perubahan besar, termasuk dalam kemiskinannya. Dengan ukuran garis kemiskinan Sajogyo, proporsi orang miskin berkurang dari 69,5% pada tahun 1972 menjadi sebesar 41,5% pada tahun 1989, sedangkan penduduk yang sangat miskin (< 240 kg setara beras/kapita/tahun) juga telah menyusut dari 43,3 pada tahun 1972 menjadi hanya 28,3%.⁵

Yang patut dicatat adalah perubahan dari tahun 1972 ke 1989 yaitu perubahan struktur ekonomi masyarakat yang semula sangat agraris menjadi "non agraris". Kalau pada tahun 1972 "sektor" pertanian menyumbang 84% dari total pendapatan masyarakat, maka pada tahun 1989, peran itu sudah digantikan oleh pendapatan dari luar pertanian yakni sebesar 72,3%. Dengan perkataan lain, telah terjadi perubahan struktur ekonomi masyarakat dari yang mengandalkan pendapatannya pada

pertanian, 20 tahun kemudian bergeser ke sektor-sektor bukan pertanian. Bahkan dari sisi angka absolutnya juga terjadi penurunan yang sangat drastis dari pendapatan rumah tangga dari pertanian setara beras sebesar 1.389 kg menjadi kurang dari separohnya yaitu 579 kg.

PEREKONOMIAN RAKYAT

Sriharjo merupakan satu dari 8 desa di kecamatan Imogiri dan satu dari 75 desa di kabupaten Bantul dengan luas wilayah 615,7 Ha (6,15 km²). Desa yang berjarak sekitar 20 kilometer ke arah selatan dari kota Yogyakarta tersebut, hampir separoh lahannya berupa sawah dan ladang yang ditanami padi. Sebagian besar lahan sawah (164 Ha) sudah beririgasi ½ teknis yakni seluas 133 Ha (80%), dan sawah tadah hujan seluas 31,5 Ha.

Jumlah penduduk Sriharjo per September 2001 tercatat 9.487 orang atau 2.079 KK (laki-laki 4.589 dan perempuan 4.898) sehingga kepadatannya sekarang adalah 1.542 orang/km². Penduduk Sriharjo tersebar di 13 dukuh (dusun), empat yang terpadat adalah Mojohuro, Miri, Jati, dan Pelem Madu. Dusun yang tidak padat penduduknya berada agak jauh dari jalan propinsi yang membelah desa Sriharjo yakni dusun Pengkol, Sompok, Kedung Miri, Sungapan, Gondosuli, Trukan, Dogongan, Ketos, dan Ngrancak. Empat dusun yang pertama terletak di sepanjang pinggir jalan propinsi yang membelah desa Sriharjo, sehingga kondisi pemukiman penduduk dan sarana umumnya lebih baik yang terletak di sekitar jalur itu, seperti jalan-jalan desa yang sudah dikeraskan (konblok) maupun toko-toko yang banyak berjejer di pinggir jalan tersebut. Untuk sembilan dusun yang terakhir, selain wilayahnya lebih luas letaknya agak ke "pedalaman" sehingga penduduknya lebih sedikit dibanding dusun-dusun yang terletak di jalan utama desa.

Mata pencaharian penduduk berbagai dusun juga bisa berbeda. Jika penduduk di pusat desa kebanyakan adalah pegawai negeri, karyawan,

⁵ Masri Singarimbun, "Perubahan-perubahan Sosial-Ekonomi di Miri Sriharjo", (1989) dalam *Kemiskinan: Peranan sistem Pasar*, Mubyarto (ed), Jakarta-UI Press, hal. 173.

maupun polisi/tentara, mereka yang tinggal di pinggir desa, sebagian besar adalah petani dan buruh tani. Selain mata pencaharian yang berbeda, pola hidup masyarakat di dua wilayah tersebut juga berbeda-beda. Umumnya, rumah-rumah penduduk yang di pusat desa lebih bersih kondisi lingkungannya, lantai mengkilap, ruangan tertata dengan baik, dan memiliki MCK di lingkungan rumah. Sebaliknya, penduduk di dusun-dusun di pinggir desa, banyak yang lantai rumahnya masih dari tanah dan belum memiliki MCK sendiri. Mereka masih mandi dan mencuci di sepanjang pinggir kali *Oyo*. Meskipun demikian, menurut kepala desa, tidak berarti bahwa mereka yang lantai rumahnya masih berupa tanah dan belum memiliki MCK di lingkungan rumahnya bisa digolongkan sebagai penduduk miskin. Meskipun kondisi rumah mereka masih sangat sederhana namun banyak di antara mereka yang memiliki sawah yang luas, sapi, televisi⁶, maupun kendaraan bermotor roda dua.

Sejak dibangun jalan propinsi dan jembatan yang menghubungkan desa Sriharjo dengan kota Yogyakarta, hampir tiap sepuluh menit ada bus angkutan yang lewat di jalan beraspal halus yang membelah bagian barat wilayah desa. Jalan raya inilah yang telah mengubah kehidupan masyarakat Sriharjo. Dengan waktu kurang dari satu jam, mereka dapat pergi ke kota bekerja sebagai buruh bangunan, pabrik-pabrik, atau buruh serabutan. Mereka menyebutnya dengan istilah *glidhik*. Pekerjaan *glidhik* ke kota Yogyakarta sangat membantu dan menyumbang pendapatan rumah tangga. Seperti telah disinggung di atas, selama dua-tiga dasawarsa terakhir, peranan pertanian mengalami penurunan yang sangat drastis, dari 84% menjadi 28% pada tahun 1989, meskipun peran sektor pertanian ini sedikit naik lagi menjadi 33% pada tahun 1998.

Selain bekerja di pertanian dan *glidhik*, penduduk Sriharjo juga digerakkan oleh berkembangnya industri-industri kecil, seperti pabrik krupuk dan pembuatan arang. Kini pembuatan arang mengalami penurunan drastis sejak hutan di sekitar desa mulai “habis”. Industri yang saat ini cukup berkembang adalah pembuatan krupuk, yang mampu menyerap tenaga kerja di desa sebanyak tak kurang dari 100 orang pada 3 pabrik krupuk yang ada di Sriharjo. *Nata de coco* yang berbahan baku kelapa, saat ini juga sedang berkembang di desa ini dan selain dipasarkan sampai ke kota Semarang juga telah melayani pesanan dalam jumlah yang besar.

KRISIS EKONOMI

Di tingkat nasional, akibat krisis moneter yang berlanjut menjadi krisis ekonomi tahun 1997-1998, kemiskinan mengalami kenaikan sangat drastis. BPS misalnya, pernah menyebut angka 80 juta penduduk miskin dan kemudian “dikoreksi” beberapa kali hingga akhirnya tinggal 39 juta penduduk miskin. Koreksi yang dilakukan beberapa kali tersebut, menunjukkan tidak adanya kesiapan “alat” untuk membuat “perkiraan” hingga perkiraannya “meleset” jauh. Ada yang menyebut hal itu karena situasi “panik” dan karena itu menjadi tidak teliti dalam membuat analisis, dan ada pula yang menyebutnya sebagai “angka politik” karena pada saat itu konstelasi politik di Indonesia memang sedang panas dan memuncak, sehingga partai-partai “oposisi” lebih-lebihkan angka kemiskinan.

Beberapa lembaga yang cukup kompeten memperkirakan angka kemiskinan absolut di Indonesia meningkat dari 22 juta atau 11% pada tahun 1996 menjadi 34 juta atau 17%. Bisa dipastikan bahwa kemiskinan tersebut juga tidak tersebar merata di seluruh wilayah di Indonesia. Ada daerah-daerah tertentu yang terkena dampak yang sangat parah, namun ada pula daerah-daerah yang tidak terkena dampak negatif, tetapi justru “menikmati” krisis dan

⁶ Saat ini lebih dari 90% penduduk desa telah memiliki televisi berwarna.

menginginkan “krisis diperpanjang”. Di daerah-daerah seperti ini, naiknya kurs dolar terhadap rupiah beberapa kali lipat dibanding sebelum krisis, justru meningkatkan harga produk mereka antara lain produk pertanian dan perikanan.

Di lain pihak, terutama kaum miskin di perkotaan, meningkatnya harga kebutuhan sehari-hari tanpa diikuti kenaikan pendapatan membuat kehidupan mereka bertambah sulit. Laporan dari beberapa propinsi, kabupaten dan desa di beberapa pulau di Indonesia, menunjukkan perbedaan yang cukup mencolok antara yang mengalami krisis parah dan mereka yang tidak terpengaruh krisis sama sekali.⁷

Ketika krisis mencapai puncaknya pada tahun 1998, P. Made Kertanegara mengadakan survei di desa Sriharjo (dusun Miri). Survei rumah tangga tersebut menunjukkan bahwa penduduk miskin di Sriharjo meningkat drastis, yang berarti bahwa krisis sangat dirasakan oleh penduduk miskin di Sriharjo.⁸ Bahkan survei menemukan bahwa penduduk sangat miskin (batas setara dengan 240 kg beras/kapita/tahun) jumlahnya meningkat hampir dua kali lipat tahun 1989, yakni sebesar 78,1%, dan yang hampir miskin dan tidak miskin hanya 12%. Survei ini menyimpulkan bahwa meningkatnya harga berbagai kebutuhan rumah tangga (terutama beras) telah menambah kemiskinan dalam jumlah yang sangat besar di Sriharjo.

Terhadap kesimpulan yang demikian, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan lebih lanjut, yaitu: **pertama**, survei yang dilakukan Made Kertanegara dilakukan hanya pada salah satu dusun dari tigabelas dusun di Sriharjo. Dusun Miri yang dipakai sebagai wilayah sampel tentu tidak dapat mewakili seluruh wilayah desa Sriharjo, yang sejak perkembangannya memiliki karakteristik wilayah dan

penduduk yang berbeda-beda. Dusun yang dipakai sebagai sampel dalam penelitian Made yang terletak di bagian terdepan paling utara sebelum memasuki wilayah Sriharjo adalah desa dengan penduduk yang sebagian besar tidak lagi menggantungkan pendapatan dari pertanian. Mereka adalah pegawai negeri, tentara, buruh bangunan di kota, serta buruh pabrik, dan lain-lain, yang sangat merasakan kenaikan harga kebutuhan sehari-hari pada saat krisis. Hal ini terjadi karena kenaikan pendapatan mereka tidak sebanding dengan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok sehari-hari.

Kedua, mengikuti apa yang disinggung oleh Alan Strout tentang sistem kekerabatan “bapak-anak” di atas, dapat dipastikan bahwa sekalipun di dusun Miri penduduk masih memiliki sistem kekerabatan itu, namun sudah tidak sekuat seperti pada masa lalu. Sebaliknya, di masyarakat dusun yang sebagian besar masih menggantungkan hidupnya pada pertanian, sistem kekerabatan “bapak-anak” akan tetap terpelihara. Sistem kekerabatan seperti inilah yang dapat memperkuat daya tahan penduduk terhadap tekanan aneka krisis. Dengan demikian dari 13 dusun yang ada di Sriharjo, ada tiga dusun lain selain Miri yang kondisi penduduknya “mirip” dengan dusun Miri, yakni dusun Mojohuro, Jati dan Pelem Madu, sedangkan 9 dusun lainnya yakni dusun Pengkol, Sompok, Kedung Miri, Sungapan, Gondosuli, Trukan, Dogongan, Ketos, dan Ngrancak, penduduknya sebagian besar masih menggantungkan hidupnya pada pertanian.

SURVEI MAHASISWA FE 2001

Pada tanggal 28 Nopember 2001, Prof. Mubyarto mengajak 66 mahasiswa yang mengambil kuliah **Ekonomi Indonesia** di bawah asuhannya mengadakan semacam “survei rumah tangga” untuk melihat secara langsung bagaimana masyarakat desa mengatasi masalah kemiskinan dan berusaha meningkatkan taraf kehidupan mereka. Setiap

⁷ Lihat, Mubyarto, **Prospek Otonomi Daerah dan Perekonomian Indonesia Pasca Krisis Ekonomi**, BPFE-Yogyakarta, 2001.

⁸ Pande Made Kutanegara, “Sriharjo Pada Masa Krisis”, dalam **Populasi**, Vol 10 No. 1, 1999

mahasiswa ditugasi mewawancarai secara khusus satu keluarga/kepala keluarga di 13 dusun di Sriharjo. Selanjutnya mahasiswa diwajibkan menulis dalam bentuk esei berisi kesan-kesan, baik dari dalam kelas maupun setelah melakukan kunjungan lapang. Oleh Mubyarto, esei tersebut dilombakan dan untuk juara pertama, kedua, dan ketiga dijanjikan hadiah. Khusus bagi tulisan terbaik

dipertimbangkan untuk dimuat dalam Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia (JEBI) edisi Januari 2002. Dengan beberapa perbaikan redaksional tanpa mengubah isi tulisan, berikut adalah paparan hasil karya pemenang, Eddy Junarsin, mahasiswa Fakultas Ekonomi UGM dengan No. mahasiswa 14131/EK.

EKONOMI RAKYAT SEBAGAI PERWUJUDAN EKONOMIKA KELEMBAGAAN INDONESIA

PENDAHULUAN

Krisis keuangan atau krisis moneter yang melanda Indonesia sejak pertengahan 1997 dinilai telah “menghancurkan” perekonomian Indonesia. Sejumlah ekonom dan analis internasional bahkan mengungkapkan bahwa Indonesia telah berada di ambang kebangkrutan. Akibatnya, terjadilah pelarian modal (*capital flight*) yang luar biasa oleh para pengusaha konglomerat ke luar negeri. Hal ini semakin memperparah kondisi perekonomian Indonesia dan mengakibatkan nilai tukar (*exchange rate*) rupiah terhadap dolar Amerika semakin melemah dan suku bunga membubung mengiringi inflasi tinggi.

Setelah terjadinya krisis moneter tersebut, timbul pertanyaan mendasar mengenai kebenaran arah dan kebijakan pembangunan ekonomi Indonesia. Beberapa bulan sebelum krisis moneter melanda Indonesia, Thailand, telah dilanda krisis terlebih dahulu. Pada saat itu, para pengamat ekonomi dan menteri-menteri bidang ekonomi, yang umumnya merupakan pendukung sistem ekonomi kapitalis, optimis Indonesia tidak akan mengalami krisis karena dianggap memiliki fundamental ekonomi kuat. Ternyata, dampak krisis moneter malahan jauh lebih serius bagi sektor perindustrian dan perbankan Indonesia. Dalam perkembangannya, biaya rekapitalisasi

perbankan di Indonesia menyita dana luar biasa besar. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ada yang tidak tepat dalam kebijakan perekonomian Indonesia selama ini. Apakah sistem ekonomi liberal-kapitalis seperti yang diterapkan di Amerika Serikat dan Eropa dapat diterapkan dengan baik untuk mencapai masyarakat adil dan makmur di Indonesia? Apakah mekanisme pasar atau persaingan murni merupakan satu-satunya cara mencapai pertumbuhan ekonomi?

Jika krisis moneter dikatakan telah melumpuhkan perekonomian Indonesia secara total, hal itu sebenarnya tidak tepat. Mubyarto (2001c) menulis bahwa pada tahun 1998, Indonesia memang mengalami kontraksi ekonomi, namun besarnya tidak sama untuk seluruh Indonesia. Contohnya, D.K.I. Jakarta mengalami kontraksi -17.49% sedangkan Irian Jaya mengalami pertumbuhan sebesar 12,83%. Secara sekilas saja, dapat kita simpulkan bahwa perekonomian tradisional justru lebih kuat daripada perekonomian modern dan kapitalis di kota-kota besar di Jawa. Pada tahun 1934, John R. Commons mengemukakan gagasan tentang ekonomika kelembagaan (*institutional economics*) (Mubyarto dan Bromley, 2001). Barangkali inilah yang dapat menjadi jawaban mengapa pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang cenderung tidak berhasil padahal ilmu ekonomi

Barat telah diterapkan “dengan baik” di sana. Menurut konsep ekonomika kelembagaan tersebut, lembaga atau institusi sosial memegang peranan sentral dalam perilaku dan tindakan ekonomi masyarakat. Apabila lembaga-lembaga ini dikembangkan dan dipertimbangkan dalam perumusan kebijakan ekonomi, niscaya arah dan kebijakan ekonomi akan mencapai tujuan lebih tepat dan memuaskan. Sistem ekonomi liberal-kapitalis memang sangat berhasil diterapkan oleh Amerika Serikat dan negara-negara Eropa karena budaya dan karakter manusianya memang sejalan, yaitu individualistis, menyukai persaingan yang keras, dan materialistis. Sebaliknya, bila diterapkan di negara-negara berkembang, misalnya Indonesia, nilai-nilai yang dianut jelas berbeda sehingga tidak membawa hasil yang memuaskan. Ekonomika kelembagaan sebetulnya menyetujui konsep kelangkaan (*scarcity*) sumber-sumber ekonomi, namun persaingan murni melalui mekanisme pasar bebas bukan merupakan satu-satunya jalan mencapai harmoni. Persaingan murni semestinya dipadukan dengan kerja sama (*cooperation*) atau tindakan bersama (*collective action*) dalam mencapai harmoni. Alasannya adalah bahwa pembangunan ekonomi pada hakekatnya bertujuan untuk mencapai pertumbuhan, moral dan etika, dan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Secara konsisten, Mubyarto (2000) berpendapat bahwa sistem ekonomi yang berdasarkan ideologi negara, Pancasila, merupakan sistem ekonomi yang ideal bagi Indonesia.

Kelemahan mendasar lainnya dalam kebijakan ekonomi Indonesia selama ini adalah diterapkannya pola pemikiran deduktif, yaitu penyamarataan semua bidang atau daerah berdasarkan teori umum. Mubyarto (2001 a;

2001 b; 2001 d) melakukan studi empiris di Sumatera Utara, Desa Gadingsari Yogyakarta, dan Kabupaten Pacitan dan Lamongan di Jawa Timur. Hasil yang dilaporkan adalah bahwa krisis moneter tidak membawa dampak negatif bagi daerah-daerah tersebut, dan hal ini sekali lagi membuktikan bahwa ekonomi rakyat justru memiliki landasan yang kuat di Indonesia. Dengan demikian, studi-studi empiris di lapangan semestinya terus dilakukan untuk memperoleh laporan yang akurat mengenai keadaan perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, pada tanggal 28 November 2001, kami bersama 65 rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, yang mengambil mata kuliah *Ekonomi Indonesia* yang diasuh Prof. Mubyarto, mengadakan kunjungan ke Desa Sriharjo, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta. Kami diantar langsung oleh Pak Muby bersama dua asisten. Setiap mahasiswa secara khusus mewawancarai seorang kepala keluarga sehingga diperoleh 66 kepala keluarga sebagai responden. Kunjungan tersebut diharapkan memberikan gambaran bagaimana Desa Sriharjo mengatasi masalah kemiskinan dan bagaimana dampak krisis moneter terhadap kehidupan masyarakat Sriharjo. Akhirnya, akan terlihat pula bagaimana kelembagaan atau budaya masyarakat mewarnai kehidupan perekonomian.

PROFIL DESA SRIHARJO

Di Kabupaten Bantul, terdapat 17 kecamatan, 75 desa, dan 933 dusun. Kecamatan-kecamatan yang terdapat di Kabupaten Bantul adalah Srandakan, Sanden, Kretek, Pundong, Bambanglipuro, Pandak, Bantul, Jetis, Imogiri, Dlingo, Pleret, Piyungan, Banguntapan, Sewon, Kasihan, Pajangan, dan Sedayu.

Tabel 1: Banyaknya Dusun, RW, dan RT di Desa-Desa dalam Kecamatan Imogiri Tahun 2000

Desa	Dusun	RW	RT
Selopamioro	18	51	103
Sriharjo	13	29	68
Kebonagung	5	10	22
Karangtengah	6	14	39
Girirejo	5	18	49
Karangtalun	5	10	23
Imogiri	4	12	31
Wukirsari	16	42	91
Jumlah	72	186	423

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul (2001a)

Sriharjo merupakan salah satu desa dalam Kecamatan Imogiri. Batas-batas wilayahnya adalah di sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kebonagung, di sebelah selatan desa Selopamioro, di sebelah Barat desa Srihardono, dan di sebelah Timur berbatasan dengan Desa Mangunan. Desa ini terletak 50 m di atas permukaan laut dengan suhu rata-rata 27°C. Jarak dari pusat kecamatan adalah 3 km, dari ibukota kabupaten adalah 10 km, dan dari Yogyakarta adalah 18 km. Selanjutnya, luas wilayah Desa Sriharjo adalah 615,7 ha dan ini merupakan yang terbesar ketiga dalam Kecamatan Imogiri setelah Desa Selopamioro (2.3 ha) dan Desa Wukirsari (1.5 ha). Dari luas wilayah tersebut, 335,9 ha adalah tanah pertanian, 183,6 ha adalah bangunan dan pekarangan, 5,3 ha adalah hutan negara, dan untuk lain-lain 90,9 ha. Di desa Sriharjo, terdapat 13 dusun yaitu Mojohuro, Miri, Jati, Pelemadu, Pengkol, Sompok, Kedungmiri, Sungapan, Gondosuli, Trukan, Dogongan, Ketos, dan Ngrancak.

Penelitian mengenai Desa Sriharjo pernah dilakukan oleh David Penny dan Masri Singarimbun pada tahun 1970, 1975, dan 1989 khususnya di Dusun Miri. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa perkembangan yang pesat terjadi di Desa Sriharjo dari desa yang sangat miskin pada tahun 1970-an

menjadi desa yang tidak miskin lagi pada tahun 1989. Menurut mereka, kemiskinan di Desa Sriharjo terutama disebabkan oleh kurangnya lahan dan tingginya pertumbuhan penduduk. Tingginya pertumbuhan penduduk dan menipisnya lahan menyebabkan lapangan pekerjaan semakin sempit. Selanjutnya, menurunnya kemiskinan di Sriharjo menurut Singarimbun adalah karena peranan *parasiswa* dan program keluarga berencana (KB). Singarimbun (1989) melaporkan bahwa penduduk miskin berkurang dari 69,5% pada tahun 1972 menjadi 41,5% pada tahun 1989, sedangkan penduduk sangat miskin turun dari 44,3% pada tahun 1972 menjadi 28,3% pada tahun 1989. Pembangunan prasarana seperti jalan dan bendungan untuk irigasi adalah faktor-faktor yang mempercepat perkembangan Desa Sriharjo. Perkembangan jumlah penduduk dirinci dalam Tabel 2.

Tabel 2: Jumlah Penduduk di Desa Sriharjo

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1989	-	-	-
2000	4.512	4.852	9.364
September 2001	4.589	4.898	9.487

Sumber: BPS Kabupaten Bantul (2001b), Mubyarto (2001e), dan Singarimbun (1989)

Pada saat ini, terdapat 2.079 kepala keluarga (meningkat dari 1.701 keluarga tahun 1989) dan kepadatan penduduknya adalah 1.542 orang per km². Jumlah penduduk Sriharjo merupakan yang tertinggi ketiga di Kecamatan Imogiri, di bawah Wukirsari (14.246 jiwa) dan Selopamioro (12.928 jiwa). Dari jumlah penduduk Sriharjo tersebut, kelompok anak-anak dan remaja (usia 5 - 19 tahun) mendominasi, yaitu 30% dari total penduduk Sriharjo. Dari Tabel 2 di atas, dapat kita ketahui bahwa pertumbuhan penduduk dari tahun 2000 ke 2001 adalah 1,31% per tahun. Angka partisipasi program KB aktif di Desa Sriharjo memang sudah cukup baik, yaitu

75,47% (dari 1,288 wanita usia subur, 972 di antaranya adalah peserta KB aktif). Namun persentase ini adalah peringkat ketiga terendah di Kecamatan Imogiri di atas Desa Karangtengah (75,09%) dan Desa Girirejo (70,54%).

Perkembangan lainnya adalah dalam kepemilikan televisi. Jika pada tahun 1989 hanya 35 keluarga yang memiliki televisi, pada tahun 2000 telah terdapat 553 unit televisi atau 90% keluarga di Desa Sriharjo telah memiliki televisi. Bahkan sedikitnya 10 keluarga telah memiliki komputer di rumah mereka. Selanjutnya, kepemilikan kendaraan bermotor juga meningkat dengan pesat dalam kurun waktu tersebut. (Tabel 3)

Tabel 3: Kepemilikan Kendaraan Bermotor di Desa Sriharjo

Tahun	Sepeda Motor	Bus	Truk	Mobil Pribadi
1975	20	0	0	0
1989	75	4	1	0
2000	447	2	8	17

Sumber: Monografi desa

Kemajuan-kemajuan tersebut barangkali yang menyebabkan ketika program IDT dilaksanakan tahun 1994-97, Desa Sriharjo tidak menerima dana IDT karena dinilai tidak miskin lagi.

DUSUN PELEMADU DAN KELUARGA CIPTOWIYONO SUNARDI

Kami mendapat bagian untuk mengunjungi Dusun Pelemadu dan mewawancarai keluarga Ciptowiyono Sunardi. Berangkat dari Balai Desa Sriharjo, kami bersama beberapa rekan diantar oleh pejabat desa menuju rumah Bapak Widyowinoto, Kepala Dusun Pelemadu. Rumah beliau sangat asri, meskipun tidak terlalu besar namun sejuk. Lantai rumah beliau memang masih menggunakan semen kasar namun perlengkapan dan perabotan rumah sangat memadai. Barang elektronik seperti

radio, tape, dan televisi telah dimiliki. Sebuah sepeda motor Yamaha juga dimiliki Pak Winoto. Karena usianya yang sudah cukup lanjut, Pak Winoto lebih senang berkomunikasi dengan bahasa Jawa halus (*kromo inggil*) kepada para tamu. Meskipun demikian, Pak Winoto menguasai bahasa Indonesia dengan baik sehingga bahasa tidak menjadi halangan bagi kami semua dalam berkomunikasi dengan beliau. Selain itu, rekan-rekan yang berasal dari Jawa Tengah, khususnya Yogyakarta, dan menguasai bahasa *Jawa halus*, membantu menerjemahkan dan menginterpretasikan ungkapan beliau.

Dusun Pelemadu yang memiliki luas 1 km² atau 100 ha sebenarnya merupakan suatu dukuh di Desa Sriharjo yang 25 ha wilayahnya merupakan tanah pertanian. Pelemadu selanjutnya dibagi lagi ke dalam empat dusun kecil, yaitu Sabrangan, Kujon, Pelemadu, dan Gatén. Batas-batas wilayahnya adalah di sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Opak, di sebelah Timur dengan dusun Mojohuro, di sebelah Utara dusun Tlogo, dan di sebelah Selatan dengan Dusun Sungapan. Di Dusun Pelemadu, terdapat 1.027 orang penduduk yang terbagi menjadi 262 kepala keluarga (KK), 6 RT, dan 3 RW. Penyebaran KK di dusun Pelemadu adalah 42 KK di Sabrangan, 43 KK di Kujon, 87 KK di Pelemadu, dan 90 KK di Gatén. Saat ini Dusun Pelemadu dipimpin oleh Bapak Widyowinoto yang telah berusia 74 tahun. Sebenarnya menurut UU No. 5 tahun 1979, usia maksimal bagi seorang kepala dusun (kadus) adalah 64 tahun. Bahkan dalam UU No. 22 tahun 1999, usia maksimal 60 tahun. Namun demikian, Pak Winoto belum diganti karena beliau sudah sangat senior dan dinilai paling mengetahui seluk-beluk dusun Pelemadu dan bahkan desa Sriharjo. Sebagai Kepala Dusun Pelemadu, Pak Winoto menerima *bengkak* atau *pelungguh* seluas 6.000m² yang ditanami padi dan palawija. Dalam kehidupan sosial kemasyarakatannya, sebagian besar penduduk Dusun Pelemadu adalah lulusan SD dan lainnya adalah lulusan

SMP dan SMU. Mata pencaharian utama adalah bertani, baik mengolah sawah sendiri maupun bekerja sebagai penggarap sawah milik orang lain. Selanjutnya, rumah *kadus* dipergunakan sebagai tempat pertemuan para tokoh masyarakat dan tempat berdiskusi mengenai berbagai kegiatan yang akan diselenggarakan dusun. Apabila terjadi perselisihan di antara warga dusun, diadakan musyawarah mulai dari tingkat RT, RW, dusun, hingga ke LKMD. Pada waktu kami berkunjung tanggal 28 November 2001, salah satu warga Pelemadu yang telah berusia 100 tahun meninggal dunia dan semua warga menghadiri upacara pemakaman. Meskipun kehidupan gotong-royong masih terpelihara, namun menurut Pak Winoto sudah agak mengendor karena semakin masuknya “budaya kota” yang diserap melalui acara-acara yang ditayangkan pesawat televisi. Dalam masalah kepercayaan, hampir semua warga dusun Pelemadu memeluk agama Islam, warga Gaten lebih cenderung bergabung dalam Muhammadiyah sedangkan warga Pelemadu lebih banyak bergabung ke Nadhatul Ulama (NU).

Setelah beramah-tamah di rumah Pak Winoto, kami diantar ke rumah keluarga tujuan kami masing-masing. Kami diantar ke kediaman Bapak Ciptowiyono Sunardi, yang biasa dipanggil Pak Cipto. Rumah Pak Cipto terletak di Kujon, Pelemadu. Pekarangan rumah cukup luas dan terdapat 3 kamar. Peralatan elektronik seperti pesawat televisi telah dimiliki. Pak Cipto lahir tahun 1947, jadi usia beliau sekarang adalah 54 tahun. Pak Cipto dikarunia tiga anak, yaitu dua putera dan seorang puteri. Semuanya telah menikah dan menetap di daerah lain dan dengan demikian, rumah tersebut kini hanya dihuni oleh Pak Cipto dan Bu Cipto. Putera pertama Pak Cipto yang bernama Jumidi bekerja sebagai tentara dan saat ini ditugaskan di Surabaya. Anak kedua bernama Suminem, tamatan SPG dan saat ini tinggal di Dusun Mojohuro, mengikuti suami. Putera ketiga yaitu Suwardi hanya

tamatan SD dan telah menikah dengan gadis Pelemadu tetapi sekarang tinggal di Sabrangan, di rumah mertuanya. Pekerjaan utama Pak Cipto adalah bertani. Beliau memiliki sawah sendiri seluas 1.000m² dan juga menggarap sawah orang lain dengan sistem bagi hasil 50%. Bu Cipto sendiri hanya berperan sebagai ibu rumah tangga, namun cukup aktif dalam kegiatan PKK. Pendidikan Pak Cipto adalah setingkat Sekolah Dasar (SD) yang ditamatkannya tahun 1961. Selanjutnya, beliau tergabung dalam kelompok masyarakat (Pokmas) Penyuluh Petani Pemakai Air (P3A) yang dinamai *Ngupoyo Tirto*. Beliau mengaku bahwa dalam setahun dapat dilakukan panen tiga kali. Dalam satu kali panen, hasil yang diperoleh adalah 3,5 kuintal beras dari sawah sendiri dan 4,5 kuintal beras dari bagi hasil dengan menggarap sawah orang lain. Dengan demikian, sekali panen, Pak Cipto memperoleh 8 kuintal beras. Harga jual beras tersebut oleh Pak Cipto adalah Rp 2.300,00 per kg, sehingga dalam sekali panen diperoleh Rp 1.840.000,00. Jadi, pendapatan perbulan Pak Cipto dan Bu Cipto kurang lebih Rp 460.000,00 (dalam ukuran beras adalah 200 kg per bulan). Jika dihitung per kapita/tahun, keluarga Pak Cipto memperoleh 1.200 kg beras per kapita per tahun. Pendapatan ini jauh di atas batas miskin yang sebesar 320 kg beras per kapita per tahun. Sementara itu, Pak Cipto mengungkapkan bahwa pengeluaran beliau dan Bu Cipto perbulan rata-rata adalah Rp 375.000,00. Dengan demikian, keluarga Pak Cipto masih bisa menabung. Berdasarkan pendapatan tersebut, apabila diurutkan secara berjenjang dari Jenjang 1 (paling miskin) hingga jenjang 6 (paling kaya), Pak Cipto termasuk ke dalam jenjang 6 di Dusun Pelemadu sehingga beliau merupakan warga terkaya kedua di dusun tersebut. Jenjang yang sama juga ditempati Pak Cipto ketika sebelum krisis moneter melanda Indonesia. Namun demikian, untuk tahun-tahun ke depan, Pak Cipto menyatakan bahwa kemungkinan untuk turun ke jenjang yang lebih rendah sangat mungkin karena bila sawah

beliau sudah dibagikan kepada ketiga anak beliau, kekayaannya akan menurun drastis.

Sehubungan dengan kondisi ekonomi, keadaan sekarang sudah lebih dari cukup dalam memenuhi kebutuhan keluarga yang kini hanya terdiri atas Pak Cipto dan Bu Cipto. Demikian pula halnya dengan konsumsi makanan dan perawatan kesehatan yang lebih dari cukup dan terawat dengan baik. Apabila Pak Cipto atau Bu Cipto sakit, mereka akan memeriksakan diri ke Puskesmas Desa Sriharjo. Sayangnya, menurut Pak Cipto, masih banyak terdapat orang miskin di Desa Sriharjo. Menurut Pak Cipto, akar utama kemiskinan adalah tingginya pertumbuhan penduduk, yaitu kurang lebih 80 bayi per tahun, bahkan lebih tinggi sebelum diperkenalkannya program KB. Dengan banyaknya anak, orang tua akan sulit menyekolahkan anak ke tingkat yang tinggi, dan kesehatan serta gizi juga sulit terjaga dengan baik. Selain itu, orang tua harus membagi warisan berupa sawah kepada banyak anak sehingga sawah yang diperoleh tiap anak sangat sedikit dan panen tidak mencukupi. Sebenarnya, program KB telah mulai disosialisasikan tahun 1973. Keluarga Pak Cipto bahkan merupakan keluarga contoh di dusun Pelemadu. Hal ini terbukti dari jumlah putera Pak Cipto yang hanya tiga orang. Sementara itu, pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah selama ini dinilai sangat membantu memperlancar kehidupan perekonomian penduduk Sriharjo. Jalan aspal yang diperkeras tahun lalu, penyediaan listrik sejak tahun 1996, dan pembangunan bendungan untuk irigasi yang telah selesai, benar-benar sangat bermanfaat bagi masyarakat, baik untuk kelancaran transportasi, peningkatan hasil pertanian, maupun kemajuan kehidupan di Desa Sriharjo. Misalnya, dengan irigasi yang semakin lancar karena pembangunan dam, hasil pertanian semakin baik dan meningkat.

Krisis moneter yang melanda Indonesia sejak 1997 ternyata tidak berpengaruh pada

kehidupan Pak Cipto dan Desa Sriharjo pada umumnya. Mereka pada umumnya mengkonsumsi hasil pertaniannya sendiri. Sayangnya, harga hasil pertanian juga tidak meningkat secara signifikan karena harga beli dari petani “diatur” oleh Bulog. Apabila krisis yang dahsyat kembali melanda dan mempengaruhi kondisi perekonomian Sriharjo, Pak Cipto mengaku akan menanggapinya dengan hidup lebih hemat karena di rumah memang hanya tinggal dua orang, yaitu Pak Cipto dan Bu Cipto. Dibandingkan dengan kehidupan orang tua beliau, kehidupan Pak Cipto saat ini jauh lebih baik. Rumah yang ditempati saat ini pun merupakan hasil kerja keras beliau. Ketika masih muda dan tinggal bersama orang tua, kehidupan Pak Cipto sangat “sederhana” sehingga untuk biaya sekolah pun tidak cukup. Ketika menginjak dewasa, Pak Cipto bekerja sangat keras, sebagai petani, peternak, dan bahkan pernah menjadi buruh pabrik. Saat ini, Pak Cipto hanya bertani saja karena merasa fisiknya sudah sangat menurun. Selanjutnya, Pak Cipto mengungkapkan bahwa di dusun Kujon, Pelemadu, terdapat 5 orang yang “merantau”, yaitu ke Jakarta, Bandung, dan Surabaya, salah satunya adalah putera Pak Cipto sendiri, yaitu Jumidi yang tinggal di Surabaya. Mereka pulang setahun sekali yaitu pada waktu Idul Fitri, namun biasanya mereka mengirim uang setiap bulan atau dua bulan sekali.

Pelayanan pemerintahan di Desa Sriharjo dinilai baik. Misalnya, dalam pembuatan kartu tanda penduduk (KTP), warga hanya menyerahkan foto dan uang Rp5.000,00 kepada kadus dan kurang dari seminggu KTP tersebut sudah diserahkan kepada warga. Pelayanan pendidikan di Desa Sriharjo juga sangat baik. Saat ini di Desa Sriharjo terdapat 5 Taman Kanak-kanak (TK), 7 Sekolah Dasar (SD), dan 1 Sekolah Menengah Pertama (SMP). Ini meningkat dari keadaan tahun 1989 pada waktu hanya terdapat 3 TK, 6 SD, dan 1 SMP. Sepengetahuan Pak Cipto, sekolah yang baru didirikan sekitar tahun 1989 dan 1990

adalah TK di Mojohuro, SD Gondosuli Inpres, SD Tunggalan I, II, dan III, dan SMP Negeri 1. Pelayanan kesehatan pun sudah cukup baik dan memadai. Desa Sriharjo memiliki sebuah Puskesmas. Dengan demikian, Sriharjo merupakan salah satu dari dua desa di Kecamatan Imogiri yang memiliki Puskesmas, selain Desa Karangtalun. Selain itu, tenaga kesehatan yang ada di Desa Sriharjo saat ini adalah 3 orang dokter, 6 bidan, 7 perawat, dan 8 dukun bayi. Jumlah tenaga kesehatan ini adalah yang terbanyak dibandingkan desa-desa lain di Kecamatan Imogiri. Biaya berobat ke Puskesmas juga sangat ringan karena mendapat subsidi dari pemerintah daerah.

Selanjutnya, menyangkut masalah keuangan, Pak Cipto menyatakan bahwa beliau mengetahui dengan baik di mana harus meminjam jika membutuhkan uang. Lembaga-lembaga keuangan mikro di Dusun Pelemadu, terutama yang berfungsi sebagai sarana menyimpan dan meminjam uang, adalah PKK Bina Swadaya dan arisan. Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah bank terdekat namun itu pun hanya berada di tingkat kecamatan. Dalam PKK Bina Swadaya, kegiatan simpan-pinjam diadakan pada setiap Senin Wage dengan pinjaman maksimal sebesar Rp. 50.000,00. Mekanismenya adalah jika warga meminjam uang Rp. 50.000,00, uang yang diterima hanya Rp. 45.000,00 sedangkan pembayaran dilakukan selama 10 kali angsuran dengan pembayaran Rp. 5.000,00 per angsuran. Jadi, jika dihitung bunganya berdasarkan aliran kas yang diterima dan dibayar, diperoleh suku bunga sebesar 1,96%. Lembaga simpan-pinjam lainnya yaitu arisan juga menggunakan sistem yang sama. Hanya saja, pinjaman maksimalnya mencapai Rp. 100.000,00 dan uang yang diterima pada waktu meminjam adalah Rp. 90.000,00. Pengembalian juga diangsur 10 kali dan dengan demikian, bunganya juga 1,96%. Pak Cipto sendiri sampai saat ini belum pernah meminjam uang dan walaupun suatu saat harus meminjam, Pak Cipto lebih menyukai arisan karena tempatnya digilir dari rumah warga

yang satu ke rumah warga yang lain sehingga dapat saling mengunjungi. Kelompok masyarakat (Pokmas) Penyuluh Petani Pemakai Air (P3A) *Ngupoyo Tirto* pernah mendapat bantuan dana dari dinas pertanian. Dana dipinjamkan kepada para petani di Sriharjo yang membutuhkan, yaitu untuk pembelian pupuk, benih, dan alat-alat pertanian lainnya. Pengembaliannya dilakukan pada saat panen dengan bunga sebesar 2%. Sampai sekarang, dana tersebut masih ada dan terus berkembang. Pak Cipto mengemukakan bahwa dana tersebut sangat membantu petani dalam meningkatkan hasil panennya. Dengan demikian, peranan lembaga keuangan mikro justru sangat potensial di Desa Sriharjo yang tanpa bank umum pun, tidak terjadi kesulitan dalam pengalokasian uang sebagaimana diramalkan oleh ekonom arus utama (*mainstream economists*).

Demikian hasil wawancara kami dengan Bapak Ciptowiyono Sunardi di Kujon, Pelemadu, Sriharjo. Selanjutnya, kami bersama salah satu rekan juga mengunjungi rumah Bapak Darso Wiramojo. Beliau mengatakan bahwa dari segi kemakmuran, Dusun Trukan merupakan dusun termakmur di Desa Sriharjo sedangkan Dusun Pelemadu dapat digolongkan sebagai dusun termaju kedua atau ketiga.

Krisis moneter yang memporak-porandakan sektor industri besar di Indonesia ternyata tidak membawa dampak negatif bagi kehidupan perekonomian di Desa Sriharjo. Padahal Desa Sriharjo hanya mengandalkan sistem ekonomi dan lembaga keuangan tradisional. Dengan PKK dan arisan sebagai sumber dana atau pinjaman, masyarakat dapat meningkatkan hasil pertanian. Program KB merupakan faktor utama yang menyebabkan menurunnya kemiskinan di Sriharjo karena kualitas pendidikan, kesehatan, dan luas sawah yang dinikmati oleh dan diwariskan kepada anak-anak meningkat dibandingkan sebelumnya. Selain itu, bantuan pemerintah kepada Pokmas *Ngupoyo Tirto* dan pembangunan bendungan

dan listrik sangat membantu peningkatan hasil pertanian. Pertanian sebagai mata pencaharian utama warga ternyata mampu menuntun masyarakat ke arah pertumbuhan yang bermoral dan berkelanjutan (terhindar dari kepunahan). Hal ini secara tidak langsung mengingatkan kita kepada ajaran mazhab Fisiokrat, yaitu bahwa petani merupakan satu-satunya produsen yang produktif (Soule, 1994).

Dengan demikian, sekali lagi terbukti bahwa lembaga dan budaya sangat patut diperhatikan dalam penentuan kebijakan ekonomi. Apabila kelembagaan telah diketahui dan dipahami dengan benar, maka penyusunan sistem dan kebijakan ekonomi yang sejalan dan diwarnai oleh lembaga tersebut akan membentuk landasan yang kokoh dan tidak mudah digoyahkan oleh krisis. Melalui studi empirik ini, *ekonomika kelembagaan Indonesia*, yaitu *ekonomi rakyat*, kembali menunjukkan ketepatan dan kekuatan pelaksanaannya di Indonesia. Kesimpulannya adalah ekonomi rakyat tidak boleh diremehkan dan harus terus diberdayakan sebagai salah satu pembentuk landasan ekonomi nasional yang kuat.

PENUTUP

Selain berbagai analisis ilmiah yang telah dilakukan untuk lebih memahami dan mengatasi masalah kemiskinan di Sriharjo, masih diperlukan upaya lebih intensif lagi untuk melaksanakan program-program penanggulangan kemiskinan. Pola yang dikembangkan, yang telah disinggung oleh Masri Singarimbun, adalah melalui kebijakan pembangunan prasarana jalan, jembatan, bangunan sekolah, puskesmas, maupun fasilitas listrik, sangat penting dan perlu terus dikembangkan. Melalui kebijakan seperti itu keterisolasian Sriharjo dapat dihilangkan, sistem ekonomi pasar dapat berkembang lebih lancar dan efisien, mobilitas penduduk ke kota dan sebaliknya dapat ditingkatkan, yang pada

gilirannya mampu menyejahterakan penduduk desa.

Namun yang sering dilupakan oleh pendekatan yang terlalu menekankan pada ekonomi dan fisik tersebut adalah hilangnya sendi-sendi sosial budaya masyarakat desa, yang sebenarnya sangat penting dan dapat dijadikan modal dasar serta faktor penguat ketahanan ekonomi masyarakat desa. Faktor sosial budaya seperti sistem kekerabatan “bapak-anak” dalam masyarakat perdesaan terbukti cukup efektif memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat desa dari hantaman krisis ekonomi tahun 1997-1998.

Kebijakan desentralisasi dalam UU Otonomi Daerah tahun 1999 dapat juga dijadikan pijakan bagi para pengamat dan pengambil kebijakan untuk lebih memperhatikan sisi sosial-budaya dalam upaya mengembangkan masyarakat. *Rembug desa* memang pernah dikenal dan berkembang serta menjadi wadah masyarakat untuk menentukan kebutuhan apa saja yang sesuai dengan aspirasi masyarakat desa. Bahkan pada waktu itu, rembug desa mampu menjadi “benteng terakhir” masyarakat desa karena dapat menengahi berbagai masalah yang timbul dalam penguasaan tanah di desa.

Setelah digantinya istilah kepala desa menjadi “lurah” kembali di seluruh desa di DIY, saat ini pemilihan anggota BPD (Badan Perwakilan Desa) sedang berlangsung di Sriharjo (Desember 2001) dan desa-desa lain di kabupaten Bantul. Faktor kelembagaan yang hendak dikembangkan ini seharusnya tidak hanya untuk menangani masalah legal/formal dari administrasi pemerintahan semata, tetapi tujuan yang lebih mendasar lagi sebenarnya adalah untuk mempertahankan dan melindungi adat istiadat dan nilai budaya yang berkembang dalam masyarakat setempat. Inilah yang dimaksud sebagai “otonomi masyarakat desa” dan bukan hanya “otonomi desa”.

REFERENSI

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul. 2001a. *Kabupaten Bantul Dalam Angka 2000*. Bantul: BPS Kabupaten Bantul.
- 2001b. *Kecamatan Imogiri Dalam Angka 2000*. Bantul: BPS Kabupaten Bantul.
- Mubyarto. 2000. *Membangun Sistem Ekonomi, edisi 1*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- 2001a. Pemulihan Ekonomi Nasional Menuju Demokrasi Ekonomi. *JEBI*, 16 (1): 1-17.
- 2001b. Mengatasi Krisis Moneter Melalui Penguatan Ekonomi Rakyat. *JEBI*, 16 (2): 97-110.
- 2001c. *Amandemen Konstitusi & Pergulatan Pakar Ekonomi, edisi 1*. Yogyakarta: Aditya Media.
- 2001d. Siklus Tujuh Tahunan Ekonomi Indonesia (1931-1966-2001-2036). *JEBI*, 16 (3): 246-260.
- Mubyarto dan Bromley, Daniel W. 2001. Ilmu Ekonomi dan Pembangunan Indonesia: A Development Manifesto for Indonesia. *JEBI*, 17, 910, 1 – 12..
- Penny, D. H. & Singarimbun, M. 1972. A Case Study of Rural Poverty. *BIES*, 8 (1): 79-95.
- Singarimbun, Masri. 1989. Perubahan-perubahan Sosial-ekonomi di Miri Sriharjo. Dalam Mubyarto (Ed.), *Kemiskinan: Peranan Sistem Pasar*. Jakarta: UI-Press.
- Soule, George. 1994. *Pemikiran Para Pakar Ekonomi Terkemuka* (diterjemahkan oleh T. Gilarsa), edisi 1. Yogyakarta: Kanisius.